

Empat RPP Minerba Ditandatangani Januari

11 Desember 2009 | 06:134 WIB

Egenius Soda
egen@majalahtambang.com



Bambang Setiawan, Dirjen Minerbapabum

Jakarta – TAMBANG. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Bambang Setiawan memastikan bahwa keempat Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-undang No.4 tahun 2009 akan diterbitkan pada Januari 2010. "Kita harapkan sudah ditandatangani sebelum tanggal 15 Januari, karena kalau lewat dari itu sudah dianggap melanggar amanat Undang-undang," tandas Bambang, di Jakarta, Kamis, 10 Desember.

Saat ini menurut Bambang keempat RPP tersebut telah diserahkan ke Departemen Hukum Dan HAM untuk dilakukan sinkronisasi.

Setelah dari Depkumham jika tidak ada perubahan maka akan diserahkan ke Sekretariat Negara untuk ditandatangani Presiden. Selain Peraturan Pemerintah, pihaknya menurut Bambang juga telah menyusun puluhan Peraturan Menteri (Permen)

"Hanya itu belum dikeluarkan, menunggu diterbitkannya PP karena Permen merupakan implementasi dari PP," tandas Bambang tanpa menyebut rinciannya. Hanya satu Peraturan Menteri yang sudah dikeluarkan yakni Peraturan Menteri No. 28/2009 tentang Usaha Jasa Pertambangan.

Seperti diketahui, pihak Ditjen Minerba Pabum menyediakan 4 RPP sebagai aturan pelaksana dari Undang-undang No.4 tahun 2009. Keempat RPP tersebut adalah RPP tentang wilayah pertambangan, RPP tentang kegiatan usaha pertambangan, RPP pembinaan dan pengawasan dan RPP reklamasi dan pasca tambang.

Bambang pun meyakini Peraturan Pemerintah tersebut akan membantu menciptakan iklim investasi di sektor pertambangan.